

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2014 ini disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang perkebunan di Jawa Timur dalam kurun waktu tahun 2009 sampai dengan 2014.

Penyusunan Rencana Strategi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur dan Rencana Strategi Daerah Provinsi Jawa Timur, dengan memperhatikan kinerja pembangunan perkebunan sebelumnya, dan setelah mencermati hasil capaian pelaksanaan pembangunan serta tantangan yang akan dihadapi maka dirasa perlu diadakan revisi target capaian kinerja pembangunan perkebunan sampai dengan 2014.

Diharapkan dokumen Rencana Strategi revisi II ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan Pembangunan Perkebunan Tahun 2009 – 2014, baik oleh aparat selaku Pembina bidang perkebunan, para pelaku usaha perkebunan maupun berbagai institusi yang terkait dengan pembangunan perkebunan di Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2014

KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Ir. MOCH. SAMSUL ARIFIEN, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19570812 198303 1 010

A. PENDAHULUAN

Komoditas perkebunan di Jawa Timur sudah dikembangkan oleh pemerintah kolonial Belanda sejak akhir abad XVII. Selanjutnya pada awal kemerdekaan, berbagai komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, kapas, dan kapuk randu dijadikan andalan sumber kesejahteraan dan kemakmuran. Oleh karena itu Jawa Timur memiliki keunggulan komparatif untuk pengembangan komoditas perkebunan terutama karena didukung oleh kondisi alam, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, dan ketersediaan industri hilir.

Perkebunan merupakan kegiatan agribisnis berbasis rakyat dan memberikan efek berantai (*multiplier effect*) bagi perekonomian masyarakat. Areal perkebunan Jawa Timur saat ini lebih dari 900 ribu ha atau hampir 32% dari total areal pertanian seluas 2,8 juta ha. Sebagian besar (85%) dari areal tersebut diusahakan langsung oleh petani.

Sektor perkebunan Jawa Timur sedikitnya menyerap 4 juta tenaga kerja secara langsung. Jutaan tenaga kerja lainnya terserap pada sektor pendukung perkebunan seperti pengolahan, angkutan, pasca panen, perdagangan sarana produksi, industri makanan & minuman dan jasa-jasa lainnya. Sentra-sentra perkebunan di Jawa Timur telah menjadi magnet bagi masyarakat sekitar untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ini menunjukkan peran sektor perkebunan sangat signifikan dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

Sebagai bagian integral dari sektor pertanian, maka pembangunan bidang perkebunan dilaksanakan dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan sektor pertanian, yaitu: (1) kebijakan ekonomi makro yang kondusif, (2) pembangunan infrastruktur pertanian, (3) kebijakan pembiayaan untuk mengembangkan kelembagaan keuangan yang khusus melayani sektor pertanian, lembaga keuangan mikro, pembiayaan pola syariah, (4) kebijakan perdagangan yang memfasilitasi kelancaran pemasaran, baik pasar dalam negeri maupun ekspor, (5) kebijakan pengembangan industri yang lebih menekankan pada agroindustri skala kecil di pedesaan dalam rangka

meningkatkan nilai tambah dan pendapatan petani, (6) kebijakan investasi yang kondusif, (7) pembiayaan pembangunan yang lebih memprioritaskan anggaran untuk sektor pertanian dan sektor-sektor pendukungnya, dan (8) perhatian Pemerintah Daerah pada pembangunan pertanian.

Kebijakan tersebut di atas merupakan penjabaran dari visi pembangunan sektor pertanian, yaitu terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdaya saing, berkerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan guna menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat pertanian.

Dengan memperhatikan ciri-ciri umum sub sektor perkebunan, pola-pola pengembangan dan tuntutan pembangunan, maka pembangunan agribisnis perkebunan ke depan akan dilakukan penyesuaian pendekatan dan orientasi, sebagai berikut:

1. Pendekatan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang bernuansa berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi;
2. Pendekatan peningkatan produktivitas usahatani melalui pemanfaatan asset agribisnis secara optimal dan berdaya saing;
3. Pendekatan penggunaan teknologi yang tersedia dan diterima oleh budidaya setempat, dengan menggunakan *agroinput* dari internal sistem pertanian secara berkelanjutan;
4. Pendekatan ke berbagai komoditas yang secara teknis sesuai dan tersedia peluang pasarnya, termasuk komoditas lokal spesifik serta pengembangan pada wilayah bukaan baru (terdesentralisasi);
5. Pendekatan pelayanan, fasilitasi, pendampingan advokasi dan penciptaan iklim yang bertumpu pada peran serta masyarakat UKM, Koperasi dan dunia usaha (partisipatif).

Melalui penyesuaian pendekatan dan orientasi tersebut, maka pembangunan perkebunan dilaksanakan secara bertahap, berkelanjutan dan konsisten, sehingga perkebunan akan dapat lebih berperan dalam pembangunan nasional maupun regional.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan perkebunan secara optimal maka diperlukan dukungan dan peningkatan peran serta seluruh stakeholder pada setiap tingkatan secara terpadu dan terkoordinasi. Dalam rangka perwujudan maksud tersebut diperlukan dokumen Rencana Strategis Pembangunan Perkebunan Tahun 2009-2014, yang dapat menjadi acuan segenap *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam pembangunan perkebunan.

B. GAMBARAN PELAYANAN SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah di bidang perkebunan, sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tanggal 20 Agustus 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1.1. Tugas Pokok

Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

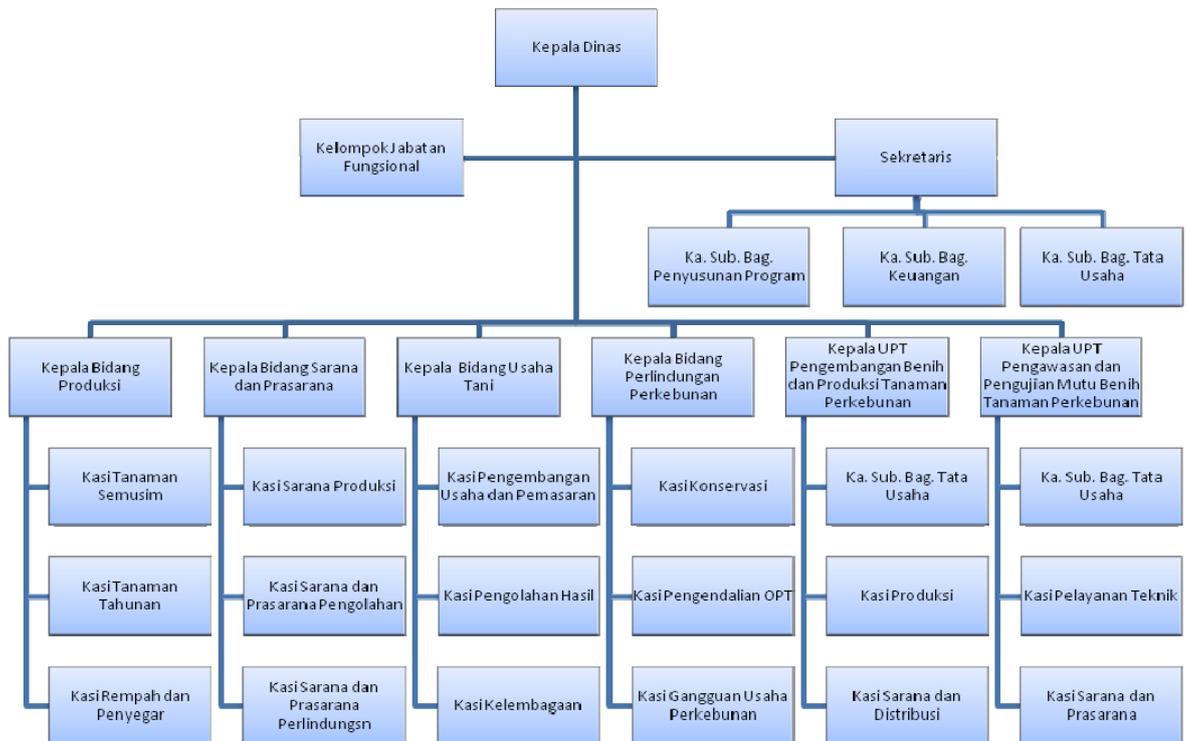
1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dimaksud terinci dalam **Gambar 1** berikut.

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur



2. Kinerja Pembangunan Perkebunan

Kinerja umum pembangunan perkebunan di Jawa Timur kurun waktu lima tahun terakhir secara langsung ataupun tidak langsung merupakan gambaran dari pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur

Bentuk pelayanan yang telah dilakukan :

- Pada kurun waktu 2004 - 2008, luas total areal perkebunan di Jawa Timur bertambah hampir 20,1 ribu ha, total produksi komoditas naik 271 ribu ton, dan produktivitas beberapa komoditas perkebunan utama rata-rata tumbuh 7% setiap tahun. Sektor perkebunan Jawa Timur setiap tahun terus memberikan kontribusi bagi PDRB Jawa Timur. Pada tahun 2008 sektor perkebunan diperkirakan menyumbang PDRB sebanyak Rp 11 triliun atau Rp 2,4 triliun lebih tinggi dibanding 2004.
- Pada kurun 2004-2008 kelembagaan petani tetap stabil dan konsisten yang merupakan dampak positif dari era reformasi serta berkembang di berbagai sentra komoditas perkebunan. Dinamika koperasi dan asosiasi petani komoditas perkebunan berkembang pesat. Ini menunjukkan program pemberdayaan petani dan kelompoknya mengalami perkembangan signifikan dan hal ini berpengaruh terhadap akses teknologi, informasi, pasar dan modal.
- Sektor perkebunan juga menyediakan lapangan kerja yang terus bertambah. Pada 2008 sektor perkebunan menyediakan lapangan kerja 1,3 juta orang atau 130 ribu orang lebih banyak dibanding serapan tenaga kerja tahun 2004. Selain itu, sumbangan cukai industri rokok yang ada di Jawa Timur menjadi sangat dominan. Rata-rata 75% total cukai secara nasional diperoleh dari cukai rokok yang dihasilkan Jawa Timur. Sejak tahun 2008 diberikan kontribusi cukai rokok oleh Pemerintah Pusat pada daerah.

2.1. Pelayanan Terhadap Areal Perkebunan

Luas areal tanaman perkebunan di Jawa Timur kurun 2004-2008 bertambah dari semula 970 ribu ha menjadi 990 ribu ha atau bertambah luas rata-rata 0,51% per tahun.

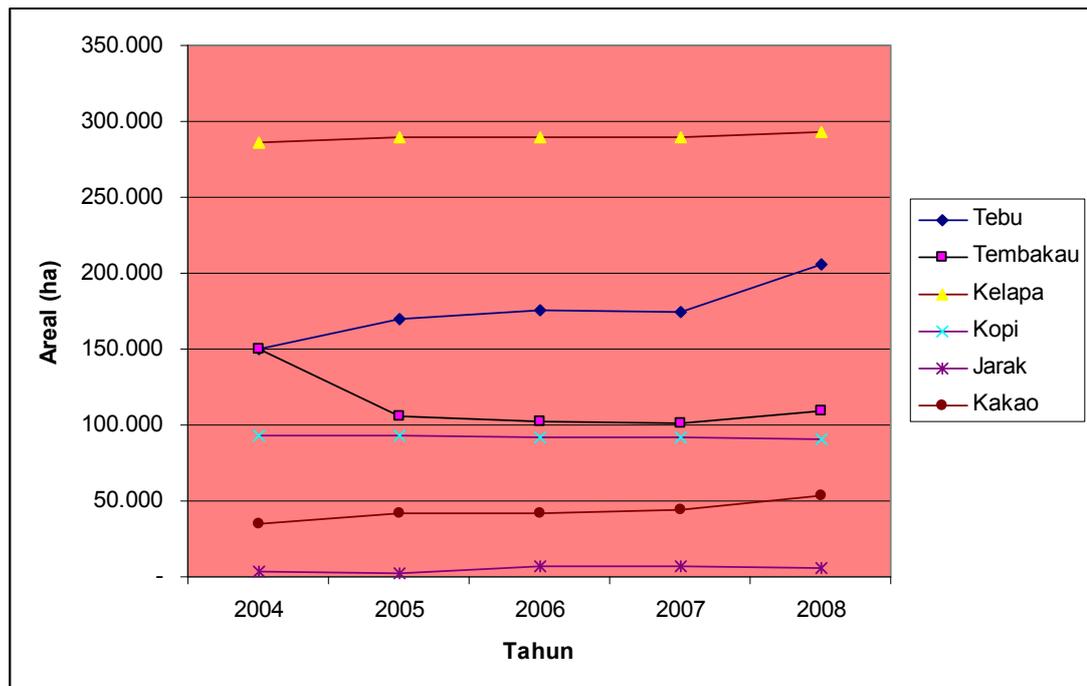
Tabel 1. Perkembangan Areal Komoditas Perkebunan di Jawa Timur, 2004 - 2008

Hektar

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Tebu	150.294	169.336	175.839	174.463	205.801	8,42
Tembakau	149.803	106.284	102.700	101.200	109.488	(6,42)
Kapas	965	1.555	1.409	1.409	2.600	34,07
Wijen	1.141	1.377	1.118	1.118	1.190	2,08
Kelapa	285.585	289.085	289.129	289.129	293.518	0,69
Kopi	93.206	93.206	91.396	91.384	90.996	(0,59)
Cengkeh	39.270	39.270	40.342	40.342	41.258	1,25
Karet	25.377	25.377	24.869	24.869	24.869	(0,50)
Kapok Randu	91.620	91.620	82.270	82.270	79.972	(3,25)
Jarak	3.601	2.251	6.404	6.404	5.396	32,82
Kakao	35.300	41.700	41.480	44.414	53.840	11,47
T e h	3.936	3.936	2.583	2.520	2.460	(9,80)
Jambu Mete	57.855	57.885	48.997	48.997	45.997	(5,36)
Lain – lain	32.518	48.954	66.439	76.045	33.189	11,09
Jumlah	970.471	971.836	974.975	984.564	990.574	0,51

Komoditas dengan areal yang luas seperti tebu, kelapa, tembakau, kopi dan kapuk randu umumnya dimiliki oleh petani. Fakta ini menunjukkan bahwa perkebunan di Jawa Timur merupakan agribisnis berbasis rakyat, sehingga sangat mengakar di masyarakat. Perubahan harga, baik input produksi maupun produk, akan berpengaruh nyata terhadap perubahan area perkebunan rakyat.

Pada kurun waktu 2004-2008, kenaikan areal hampir terjadi untuk semua komoditas perkebunan (lihat **Gambar 2**). Peningkatan areal yang cukup tajam tajam pada komoditas tebu, kapas, jarak dan kakao. Sebaliknya areal tembakau, kapok randu, teh, karet dan kopi pada kurun yang sama cenderung menyusut.



Gambar 2. Perkembangan Areal Beberapa Komoditas Perkebunan di Jawa Timur, 2004-2008

2.2. Pelayanan terhadap Produksi Perkebunan

Pada 2004-2008 produksi perkebunan Jawa Timur menunjukkan peningkatan. Secara agregat peningkatan produksi perkebunan naik rata-rata 4,23% per tahun. Gambaran ini menunjukkan suatu kecenderungan yang positif dari perbaikan kualitas komoditas, karena pada 2004-2008 luas total areal perkebunan hanya bertambah sedikit (0,51% per tahun). Artinya peningkatan produksi lebih banyak disumbangkan oleh kenaikan produktivitas tanaman.

Pertumbuhan produksi komoditas perkebunan rata-rata meningkat sebesar 4,23% per tahun (lihat Tabel 2). Pada umumnya semua komoditas perkebunan meningkat secara positif, kecuali untuk komoditas tembakau yang menurun sebesar 9,0% (dan memang diprogramkan untuk dikurangi), kelapa (-1,10%) dan teh (-9,47%). Peningkatan yang sangat signifikan ditunjukkan oleh komoditas jarak, tebu dan kapas.

Produksi secara keseluruhan pada tahun 2008 sebesar 1,8 juta ton dan mengalami peningkatan sebesar 0,3 juta ton apabila dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 1,54 juta ton.

Tabel 2. Perkembangan Produksi Komoditas Perkebunan di Jawa Timur, 2004-2008, (dalam ton)

Ton

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Tebu	901.183	1.060.000	1.099.185	1.099.186	1.319.263	10,34
Tembakau	110.837	77.421	77.427	68.986	72.457	(9,00)
Kapas	671	565	243	859	921	46,98
Wijen	874	837	700	700	952	3,85
Kelapa	261.682	262.916	267.719	236.430	248.244	(1,10)
Kopi	43.598	43.670	43.870	49.818	50.935	4,11
Cengkeh	10.157	10.260	10.290	7.564	11.162	5,60
Karet	16.673	16.680	16.598	16.598	16.910	0,36
Kapok Randu	26.626	27.940	28.436	28.507	30.017	3,06
Jarak	785	555	7.001	7.001	3.611	270,93
Kakao	15.622	15.856	16.256	19.672	16.512	2,24
T e h	4.867	5.729	3.210	4.140	2.460	(9,47)
Jambu Mete	12.180	12.214	13.919	13.923	14.553	4,70
Lain - lain	135.279	27.616	28.615	69.707	24.290	0,62
Jumlah	1.541.034	1.562.259	1.613.469	1.623.091	1.812.287	4,23

2.3. Pelayanan Terhadap Peningkatan Produktivitas

Pada 2004-2008 hampir semua komoditas perkebunan di Jawa Timur mengalami peningkatan produktivitas, walaupun masih adanya fluktuasi produktivitas akibat pengaruh iklim tahunan. Produktivitas jarak rata-rata naik cukup tinggi yaitu 51,35% per tahun, kakao 14,57%, kapok randu 8,67%, karet 7,35%, kapas 6,23%, jambu mete 5,75%, kopi 5,89%, wijen 3,09%, dan tebu 2,14% per tahun (lihat Tabel 3).

Secara agregat produktivitas tanaman perkebunan 2004-2008 rata-rata naik sekitar 7,12%. Upaya yang telah dilakukan mulai 2004 memberikan hasil nyata dalam peningkatan produktivitas komoditas perkebunan. Kenaikan peroduktivitas yang menyebar pada hampir semua komoditas serta banyak disumbangkan oleh penanaman komoditas baru yaitu jarak kepyar dan jarak pagar, kakao dan wijen.

Tabel 3. Perkembangan Produktivitas Komoditas Perkebunan di Jawa Timur, 2004-2008, (dalam kg/ha/tahun)

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Tebu	5.910	6.454	6.323	6.300	6.410	2,14
Tembakau	874	674	780	682	662	(5,66)
Kapas	718	480	245	610	354	6,23
Wijen	766	608	626	626	814	3,09
Kelapa	1.406	1.414	1.281	1.406	1.378	(0,27)
Kopi	612	580	589	735	753	5,89
Cengkeh	665	347	318	287	407	(6,03)
Karet	984	984	1.349	1.232	1.244	7,35
Kapok Randu	443	443	625	558	582	8,67
Jarak	272	344	1.093	1.093	669	51,35
Kakao	665	375	815	1.065	574	14,57
T e h	1.738	1.740	1.513	1.954	1.593	(0,56)
Jambu Mete	759	443	715	711	738	5,75
Rata – rata 2004 - 2008						7,12

Pada kondisi wilayah seperti Jawa Timur di mana persaingan penggunaan lahan relatif ketat, terutama dengan pemukiman dan industri, areal perkebunan umumnya mulai tergeser ke wilayah-wilayah yang kurang produktif. Pergeseran ini umumnya akan diikuti oleh penurunan produktivitas. Pada kondisi seperti ini peningkatan produktivitas memerlukan usaha sungguh dari berbagai pihak.

2.4. Pelayanan Terhadap Serapan Tenaga Kerja

Serapan tenaga kerja sektor perkebunan di Jawa Timur setiap tahun pada kurun 2004-2008 terus meningkat rata-rata 3,08% per tahun. Peningkatan serapan tenaga kerja di sektor perkebunan tidak terlalu besar karena pertumbuhan areal hanya 0,39% setahun. Pada 2004 tenaga yang diserap sub sektor perkebunan sekitar 1,2 juta orang dan pada tahun 2008 bertambah menjadi 1,35 juta orang (lihat Tabel 4).

Jumlah tenaga kerja yang terlibat di perkebunan rakyat tampaknya sangat dominan. Rata-rata sejak 2004 jumlah tenaga kerja yang diserap perkebunan rakyat sekitar 85% dari total tenaga kerja sektor perkebunan. Perkebunan rakyat tampaknya masih menjadi sumber penyedia lapangan kerja yang potensial di Jawa Timur.

Tabel 4. Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja di Sub Sektor Perkebunan 2004-2008 (dalam orang)

orang

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Tenaga Kerja	1.220.680	1.261.652	1.301.815	1.344.403	1.351.292	3,08

2.5. Pelayanan Terhadap Ekspor Komoditas Perkebunan

Volume ekspor komoditas perkebunan yang tercatat melalui pelabuhan laut dan udara di Jawa Timur kurun 2004-2008 mengalami fluktuasi yang tajam (Tabel 5). Pada 2004 volume ekspor sub sektor perkebunan sekitar 729 juta ton, kemudian menurun pada 2005 menjadi hanya 151 juta ton, namun tahun-tahun berikutnya cenderung terus meningkat. Bila pada 2004 nilai ekspor seluruh komoditas perkebunan mencapai USD 512 M, namun pada 2008 diprediksikan hanya tinggal USD 211 M.

Tabel 5. Volume dan Nilai Ekspor Sektor Perkebunan di Jawa Timur 2004-2008

Tahun	Volume (ton)	Nilai (x 1000 USD)
2004	729.367.000	512.073.232
2005	150.561.000	208.931.337
2006	398.465.740	210.111.971
2007	339.846.574	210.111.971
2008	340.546.000	211.162.530
Pertumbuhan rata-rata (%)	17,70	(14,53)

Penurunan volume ekspor produk perkebunan tampaknya dipengaruhi juga oleh perkembangan pesat industri hilir pengguna produk primer perkebunan di Jawa Timur. Salah satu contoh industri perkebunan yang tumbuh pesat di Jawa Timur adalah industri rokok dengan bahan baku tembakau dan industri fermentasi dengan bahan baku tetes. Kedua industri ini menyerap sebagian besar bahan baku yang dihasilkan dari Jawa Timur.

2.6. Pelayanan Terhadap Pendapatan Petani dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkebunan

Sub Sektor perkebunan memberikan sumbangan nyata bagi Produk Regional Domestik Bruto (PDRB). Pada kurun 2004-2008 sumbangan sektor perkebunan terhadap PDRB Jawa Timur rata-rata bertambah 9,53% setiap tahun. Pada 2004 sumbangan perkebunan terhadap PDRB hanya Rp 8,7 trilyun, namun pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp 11,1 trilyun atau naik hampir 1,3 kali lipat (lihat Tabel 6).

Demikian juga dengan pendapatan petani perkebunan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) rata-rata mengalami peningkatan sebesar 2,05% per tahun (lihat Tabel 7). Pada tahun 2004 pendapatan petani perkebunan sebesar Rp 912 ribu menjadi Rp 986 ribu pada tahun 2008. Namun demikian pendapatn ini belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu menuju USD 1500/KK/tahun atau setara dengan Rp 3.600/petani perkebunan (asumsi 1 KK = 5 orang anggota keluarga).

Tabel 6 Perkembangan PDRB Sub Sektor Perkebunan di Jawa Timur 2004-2008 (dalam juta rupiah)

Rp juta

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	8.680.149	8.680.149	11.057.696	11.057.696	11.112.985	9,53

Tabel 7 Perkembangan Perkiraan Pendapatan Petani Perkebunan di Jawa Timur, 2004-2008 (dalam rupiah)

Rp

URAIAN	TAHUN					Pertumbuhan rata-rata (%)
	2004	2005	2006	2007	2008	
Pendapatan Petani Perkebunan (Rp/Kapita ADHK*)	912.849,1	997.967,2	970.810,5	974.825,3	986.544,6	2,05

*) ADHK = Atas Dasar Harga Konstan

2.7. Pelayanan terhadap Kelembagaan Petani Perkebunan

Pemberdayaan petani dan kelompoknya, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi, merupakan salah satu pilar utama pendukung pembangunan perkebunan. Di Jawa Timur, sejak 2000 jumlah kelembagaan petani terus bertambah. Pada tahun 2004 jumlah kelompok petani ada 10.534, koperasi primer 301 dan sekunder 3 unit, asosiasi petani di tingkat Provinsi telah tumbuh sebanyak 9 unit, sementara di tingkat kabupaten/kota ada 68 unit. Pada tahun 2008 kelembagaan petani perkebunan masih tetap berkembang. Asosiasi petani perkebunan di tingkat kabupaten/kota menjadi 74 unit atau tumbuh 2,17%.

Keragaan kelembagaan petani perkebunan dapat dilihat pada Tabel 8 berikut. Dinamika kelembagaan petani perkebunan sangat menonjol pada komoditas tebu, yang merupakan perintis berkembangnya kelembagaan petani perkebunan di Jawa Timur.

Tabel 8 Perkembangan Kelembagaan Petani Perkebunan di Jawa Timur, 2004-2008

Tahun	Kelompok Tani	Koperasi		Asosiasi	
		Primer	Sekunder	Provinsi	Kab/Kota
2004	10.534	301	3	9	68
2005	10.862	301	3	9	72
2006	10.871	301	3	9	74
2007	10.871	301	4	9	74
2008	10.871	303	4	9	74
Pertumb. Rata-2 (%)	0,80	0,17	8,33	-	2,17

2.8. Pelayanan dalam Pengembangan Ekonomi Wilayah

Di Jawa Timur telah ditetapkan 7 (tujuh) wilayah Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN), yang dipergunakan sebagai dasar perwilayahan utama bagi penetapan kebijakan pengembangan agribisnis perkebunan. Wilayah KIMBUN tersebut ditetapkan berdasarkan pertimbangan spasial (homogenitas dan nodalitas agroekosistem wilayah, yaitu:

- Kawasan Ijen-Argopuro-Raung, meliputi Kabupaten Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi dan Jember. Tingkat pendayagunaan lahan di wilayah Kimbun ini relatif intensif terutama untuk komoditas prioritas seperti kopi (robusta dan arabika), kakao, kelapa, tembakau (lokal dan Na-Oogst), dan tebu.
- Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, meliputi Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, Malang dan Lumajang. Pendayagunaan lahan di wilayah ini serupa dengan di kawasan Ijen-Argopuro-Raung, yaitu relatif intensif untuk komoditas prioritas seperti kopi (robusta dan arabika), kakao, kelapa, cengkeh dan tebu.
- Kawasan Kelud, meliputi Kabupaten Jombang, Kediri, Blitar, Mojokerto dan Malang, dengan tingkat pendayagunaan lahan yang relatif masih ekstensif untuk komoditas prioritas yaitu cengkeh, kopi (robusta dan arabika), kelapa, kakao, tebu dan jarak.

- Kawasan Wilis, meliputi Kabupaten Madiun, Nganjuk, Ponorogo, Tulungagung, dan Trenggalek, dengan tingkat pendayagunaan lahan yang relatif ekstensif untuk komoditas prioritas yaitu kopi, tebu, kelapa dan kakao.
- Kawasan Lawu, meliputi Kabupaten Magetan, Ngawi dan Pacitan. Tingkat pendayagunaan lahan di kawasan ini relatif ekstensif terutama untuk komoditas prioritas yaitu kopi, kelapa, kakao, cengkeh dan jarak pagar.
- Kawasan Pantura, meliputi Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Sidoarjo dan Gresik, dengan tingkat pendayagunaan lahan yang relatif ekstensif terutama untuk komoditas prioritas yaitu tembakau (lokal dan Virginia), tebu, dan kelapa
- Kawasan Kepulauan Madura, meliputi Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Tingkat pendayagunaan lahan yang relatif intensif terutama untuk komoditas prioritas yaitu tembakau, jambu mete, cabe jamu dan kelapa.

Berdasarkan kesesuaian lahan dan iklim serta prospek ke depan, maka ditetapkan 9 (sembilan) jenis komoditas dalam pengembangan KIMBUN di Jawa Timur, yaitu Kopi, Kelapa, Kakao, Cengkeh, Jambu Mete, Tebu, Tembakau, Kapas dan Jarak Pagar. Sedangkan untuk pengembangan komoditas lokal spesifik tergantung dari keunggulan wilayah dalam lingkup terbatas.

Secara keseluruhan, Kimbun di Jawa Timur pada saat ini masih berada pada tingkat pendayagunaan lahan yang ekstensif, sehingga upaya intensifikasi dan diversifikasi masih terbuka luas. Termasuk kegiatan untuk meningkatkan tingkat productivitas berupa rehabilitasi dan peremajaan tanaman pada eksisting yang telah ada selama ini di lapangan.

C. ISUE - ISUE STRATEGIS

Pembangunan perkebunan tidak terlepas dari pengaruh isue – isue strategis yang ada, baik lingkungan internal yaitu pada tingkat regional Jawa Timur maupun lingkungan eksternal yaitu pada tingkat nasional bahkan sampai pada tingkat internasional. Pada tingkat regional, lingkungan strategis yang dominan mempengaruhi perubahan pembangunan perkebunan meliputi kelangkaan dan degradasi kualitas Sumber Daya Alam (SDA), pengembangan IPTEK dan permintaan terhadap energi terbarukan serta permintaan terhadap produk organik.

Pengaruh perubahan lingkungan eksternal yang dominan adalah: perdagangan yang semakin liberal dan tidak adil, tuntutan konsumen akan kualitas produk yang aman dan ramah lingkungan, transportasi dan telekomunikasi serta perkembangan produk substitusi serta krisis global yang melanda dunia sejak akhir tahun 2008.

1. Lingkungan Internal

1.1. Kelangkaan dan degradasi kualitas Sumber Daya Alam

Terjadi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, rendahnya luas kepemilikan dan meningkatnya intensitas usahatani di daerah hulu aliran sungai yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air sehingga mengakibatkan terjadinya degradasi kualitas sumberdaya alam.

1.2. Pengembangan IPTEK

Perkembangan iptek yang demikian cepat mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku konsumen atas permintaan produk perkebunan, perubahan sistem tata niaga dan arus informasi yang sangat cepat dan berdampak pada persaingan yang semakin ketat.

1.3. Perkembangan permintaan energi terbarukan dan pupuk organik.

Sejalan dengan meningkatnya kesadaran terhadap kelestarian lingkungan dan semakin langkanya sumber energi yang ada serta permintaan

energi bahan bakar yang semakin meningkat, maka hal tersebut merupakan peluang pengembangan sumber energi terbarukan yang berasal dari komoditas perkebunan seperti tebu, kelapa dan jarak pagar di Jawa Timur.

Di lain pihak dengan kesadaran akan produk yang menjamin terhadap keamanan pangan dan kesehatan masyarakat maka penggunaan pupuk serta pestisida botani akan semakin berkembang, disamping dengan kondisi tata niaga yang semakin sulitnya masyarakat untuk memperoleh pupuk anorganik. Sebagai dampaknya maka terjadi penurunan terhadap konsumsi tembakau akibat kampanye anti rokok dan pembatasan tempat merokok bagi masyarakat, serta meningkatnya penggunaan limbah organik sebagai bahan baku pupuk organik.

1.4. Perubahan iklim global dan bencana alam.

Perubahan teknologi dan jumlah penduduk yang semakin cepat menyebabkan tekanan tersendiri terhadap keseimbangan alam dan iklim yang terjadi. Keadaan ini mengakibatkan pergeseran kondisi alam dan terjadinya berbagai bencana alam untuk menemukan keseimbangan baru. Dengan demikian diperlukan kesadaran secara bijak dalam melakukan budidaya untuk lebih konservatif dalam rangka melestarikan sumberdaya alam yang ada.

Keadaan ini memberikan peluang yang lebih besar dalam rangka menjaga kelestarian alam agar tidak lagi terjadi bencana dan perubahan iklim secara ekstrim. Selain itu kaidah – kaidah berbudidaya harus memanfaatkan teknologi baru yang sesuai dengan kaidah iklim dan alam yang telah mengalami pergeseran. Dengan demikian petani perkebunan tidak lagi terpaku pada standart baku lama yang dirasakan kurang sesuai dengan kondisi saat ini. Peranan lembaga penelitian menjadi terdepan dalam mencari teknologi yang lebih baru dan sesuai dengan keadaan.

2. Lingkungan Eksternal.

2.1. Perdagangan yang Semakin Liberal

Perdagangan menjadi lebih transparan dan persaingan menjadi semakin ketat. Pasar bebas yang diciptakan oleh perjanjian perdagangan

pertanian hanya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh negara-negara yang merupakan jaringan importir, dan negara-negara eksportir yang efisien dan memiliki keunggulan komparatif. Sehingga untuk dapat tetap survive dan berhasil menghadapi persaingan yang semakin ketat, masyarakat perkebunan dituntut untuk dapat meningkatkan daya saing produk-produk perkebunan.

Bagi yang mampu meningkatkan daya saingnya, mempunyai kesempatan untuk memperbesar pangsa pasarnya, baik pasar internasional maupun pasar domestik. Menghadapi liberalisasi perdagangan ini, sub sektor perkebunan dituntut untuk mempercepat peningkatan daya saing, baik dari sisi permintaan (*demand side*) maupun dari sisi penawaran (*supply side*) dengan memperhatikan produktivitas, efisiensi dan mutu hasil produk perkebunan.

2.2. Perilaku Konsumen

Pada sisi permintaan telah terjadi perubahan nilai yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli produk perkebunan. Perubahan-perubahan tersebut meliputi:

- Meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya keterkaitan kesehatan dan kebugaran dengan konsumsi makanan, telah meningkatkan tuntutan konsumen akan kandungan nutrisi dari produk-produk yang sehat, aman dan menunjang kebugaran;
- Perubahan gaya hidup masyarakat telah merubah pola dan gaya konsumsi yang menuntut keanekaragaman produk dan keragaman kepuasan;
- Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kaitan antara kelestarian lingkungan hidup dengan kesejahteraan manusia yang mendorong masuknya aspek kelestarian lingkungan dalam pengambilan keputusan ekonomi;

Perubahan-perubahan tersebut menjadikan konsumen semakin cerdas dan terdidik untuk menuntut atribut produk yang lebih detail, seperti: atribut keamanan produk (*safety attributes*), atribut nutrisi (*nutritional attributes*), atribut nilai (*value attributes*), atribut pengepakan (*package attributes*), atribut lingkungan (*ecolabelled attributes*) dan atribut kemanusiaan (*humanistic attributes*).

2.3. Kemajuan Transportasi dan Komunikasi

Pesatnya kemajuan transportasi dan komunikasi saat ini menyebabkan dunia semakin mengglobal. Kemajuan ini untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin mendukung kemajuan pembangunan perkebunan di Jawa Timur, yang sebagian besar merupakan komoditas ekspor yang irama perdagangannya sangat dipengaruhi oleh fluktuasi perdagangan internasional.

Kelembagaan petani perkebunan hendaknya dengan jeli memanfaatkan kemajuan IPTEK, yang berhubungan dengan kecepatan transportasi dan komunikasi pada pergaulan nasional dan internasional. Tidak pada tempatnya kelembagaan petani perkebunan menggantungkan diri hanya dari informasi yang diperoleh dari petugas lapangan saja.

2.4. Berkembangnya Produk Substitusi.

Beberapa komoditas perkebunan menghadapi persaingan tidak hanya dari komoditas yang sejenis tetapi juga menghadapi persaingan komoditas substitusi seperti kapas alam dengan serat sintetis, karet dengan produk sintetisnya, minyak nabati komoditas perkebunan dengan minyak nabati non perkebunan seperti minyak kedelai, minyak jagung.

2.5. Krisis Global Dunia

Akibat terjadinya krisis global dunia pada akhir 2008 ini maka dampaknya diperkirakan akan mulai dirasakan pada pertengahan 2009 yang akan datang. Kondisi ini hendaknya disikapi dengan hati-hati karena akan berpengaruh pada melemahnya ekspor komoditas perkebunan ke negara-negara maju mulai tahun 2009 ini, yang akan juga mempengaruhi daya jual komoditas perkebunan. Kalau ini terjadi maka akan mempengaruhi semangat petani perkebunan dalam mengembangkan pembangunan perkebunan.

D. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. Visi

Visi pembangunan perkebunan di Jawa Timur adalah : “ ***Jawa Timur sebagai pusat agribisnis perkebunan di Indonesia Bagian Timur***”.

2. Misi

Untuk mencapai harapan yang terkandung dalam visi pembangunan perkebunan, maka ditetapkan misi pembangunan perkebunan tahun 2009-2014 adalah sebagai berikut : “ ***Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, melalui pengembangan sistem agrobisnis agroindustri untuk kesejahteraan petani***”.

3. Tujuan dan Sasaran

3.1. Tujuan

Berdasarkan visi dan misi pembangunan perkebunan serta memperhatikan potensi perkebunan rakyat merupakan bagian terbesar dari seluruh areal perkebunan di Jawa Timur, maka pembangunan perkebunan diarahkan kepada pencapaian tujuan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk penyediaan lahan perkebunan abadi ;
2. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan, memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan jumlah keterlibatan dan pendapatan pelaku perkebunan.

3.2. Sasaran

Dengan mengacu kepada misi dan tujuan pengembangan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan, maka sasaran yang ingin dicapai pada akhir 2014 adalah :

1. Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran hektar capaian luas areal tanaman perkebunan ;
2. Meningkatnya produksi tanaman perkebunan, dengan indikator sasaran ton capaian produksi tanaman perkebunan per tahun ;
3. Meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan, dengan indikator sasaran rata-rata kilogram/hektar/ tahun produktivitas Usaha Perkebunan ;

**MATRIK RENSTRA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2009 -2014**

- VISI** : Jawa Timur sebagai pusat agribisnis perkebunan di Indonesia Bagian Timur
MISI : Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas komoditas perkebunan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan, melalui pengembangan sistem agrobisnis agroindustri untuk kesejahteraan petani”
TUJUAN : a. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk penyediaan lahan perkebunan abadi
 b. Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan, memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan jumlah keterlibatan dan pendapatan pelaku perkebunan.
TUGAS : Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan
FUNGSI : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perkebunan
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
 d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

Tujuan 1 : Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya lahan secara berkelanjutan dan pengembangan wilayah untuk penyediaan lahan perkebunan abadi

Indikator Kinerja Tujuan : % Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan 2009 s/d 2014

Satuan	% peningkatan areal tahun 2009 s/d 2014
Prosentase	5,81

No	Sasaran Strategi		Definisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Target Tahun ke-n (%)						Strategi Pencapaian		Sumber Data / Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program/Kegiatan	
1	Meningkatnya luas areal tanaman perkebunan	% meningkatnya luas areal tanaman perkebunan	(Jumlah hektar capaian luas areal komoditi perkebunan tahun ke n) - (Jumlah hektar capaian luas areal komoditi perkebunan tahun ke n-1) / Jumlah hektar capaian luas areal komoditi perkebunan tahun ke n-1 X 100 %	1,16	1,16	1,15	1,14	1,12	1,11		1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 2 Program Pengembangan Kawasan Agropolitan 3 Program Peningkatan Ketahanan Pangan	

Tujuan 2 : Meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing perkebunan, memenuhi kebutuhan konsumsi dan meningkatkan penyediaan bahan baku industri dalam negeri serta meningkatkan jumlah keterlibatan dan pendapatan pelaku perkebunan.

Indikator Kinerja Tujuan 1 : % Peningkatan luas areal tanaman perkebunan 2009 s/d 2014

Satuan	% peningkatan produksi tahun 2009 s/d 2014
Ton	22,04

No	Sasaran Strategi		Definisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Target Tahun ke n (%)						Strategi Pencapaian		Sumber Data / Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program/Kegiatan	
1	Meningkatnya produksi perkebunan	% peningkatan produksi komoditi perkebunan	(Jumlah ton capaian produksi komoditi perkebunan tahun ke n) - (Jumlah ton capaian produksi komoditi perkebunan tahun ke n-1) / Jumlah ton capaian produksi komoditi perkebunan tahun ke n-1 X 100 %	4,41	4,41	4,22	4,05	3,89	3,75		1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 2 Program Pengembangan Agribisnis	

Indikator Kinerja Tujuan 2 : % Peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan tahun 2009-2014

Satuan	% Peningkatan produktivitas
%	

No	Sasaran Strategi		Definisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Tahun Dasa	Target Tahun ke n (%)						Strategi Pencapaian		Sumber Data / Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program/Kegiatan		
2	Meningkatnya produktivitas komoditi perkebunan	% Peningkatan produktivitas Tanaman Perkebunan - Tebu - Kakao - Cengkeh - Tembakau - Kelapa - Kopi - Jambu Mete	1 (kg/ha/th capaian produktivitas tebu tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas tebu tahun ke n-1) X100% (kg/ha/th capaian produktivitas tebu tahun ke n-1)		5,00	4,76	4,55	4,35	4,17		1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 2 Program Pengembangan Agribisnis		

No	Sasaran Strategi		Difinisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Tahun Dasa	Target Tahunan					Strategi Pencapaian		Sumber Data / Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program/Kegiatan	
			<p>2 (kg/ha/th capaian produktivitas kakao tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas kakao tahun ke n-1) X100%</p> <p>(kg/ha/th capaian produktivitas kakao tahun ke n-1)</p>		1,25	1,23	1,22	1,20	1,19			
			<p>3 (kg/ha/th capaian produktivitas cengkeh tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas cengkeh tahun ke n-1) X100%</p> <p>(kg/ha/th capaian produktivitas cengkeh tahun ke n-1)</p>		4,0	3,85	3,70	3,57	3,45			
			<p>4 (kg/ha/th capaian produktivitas tembakau tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas tembakau tahun ke n-1) X100%</p> <p>(kg/ha/th capaian produktivitas tembakau tahun ke</p>		2,86	2,78	2,70	2,63	2,56			

No	Sasaran Strategi		Difinisi Operasional Dan Formula Perhitungan	Tahun Dasa	Target Tahunan					Strategi Pencapaian		Sumber Data / Penjab
	Uraian	Indikator Kinerja Utama		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Kebijakan	Program/Kegiatan	
			5 (kg/ha/th capaian produktivitas kelapa tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas kelapa tahun ke n-1) <hr/> X100% (kg/ha/th capaian produktivitas kelapa tahun ke n-1)		2,08	2,04	2,00	1,96	1,92			
			6 (kg/ha/th capaian produktivitas kopi tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas kopi tahun ke n-1) <hr/> X100% (kg/ha/th capaian produktivitas kopi tahun ke n-1)		4,17	4,00	3,85	3,70	3,57			
			7 (kg/ha/th capaian produktivitas Jambu Mete tahun ke n) - (kg/ha/th capaian produktivitas Jambu Mete tahun ke n-1) <hr/> X100% (kg/ha/th capaian produktivitas Jambu Mete tahun ke n-1)		1,54	1,52	1,49	1,47	1,45			

4. Strategi dan Kebijakan

Dalam mewujudkan visi dan misi Pembangunan Perkebunan di Jawa Timur, maka pelaksanaannya diarahkan kepada terbentuknya Kawasan Perkebunan, yaitu pembangunan perkebunan pada suatu kawasan yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi melalui upaya pemberdayaan masyarakat perkebunan dengan pendekatan agribisnis yang utuh dan berkelanjutan berbasis di pedesaan sehingga tercapainya suatu kondisi masyarakat berbudaya industri yang harmonis secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Arah masa depan bidang perkebunan Jawa Timur pada dasarnya mencakup seberapa besar peran dan posisi perkebunan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah Jawa Timur. Dengan memosisikan bidang perkebunan dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan pembangunan wilayah akan menemukan strategi dan prioritas pengembangan komoditas strategi yang diharapkan dapat mendukung perbaikan kondisi petani-pekebun, kondisi sumberdaya perkebunan Jawa Timur; serta perbaikan kondisi produk dan kegiatan usaha berbasis komoditas perkebunan Jawa Timur di masa depan.

Dalam proses pembangunan perkebunan Jawa Timur, harus tercermin proses perubahan kondisi dari ciri dan citra kemiskinan, keureman, serta menghadapi berbagai keterbatasan faktor produksi, khususnya lahan, modal, teknologi, dan kemampuan pemasaran; menjadi petani-pekebun yang berdaya, bermartabat dan sejahtera.

Sehubungan dengan hal tersebut harapan terhadap kondisi petani-pekebun dan usaha perkebunan Jawa Timur adalah:

- Berkembangnya skala lahan garapan petani-pekebun sesuai dengan skala keekonomiannya, termasuk dengan pengusahaan rata-rata lahan petani-pekebun yang lebih luas dari kondisi saat ini.
- Petani-pekebun Jawa Timur memiliki akses untuk turut melakukan dan menguasai kegiatan hulu, tengah dan hilir dalam sistem produksi-distribusi perkebunan (sistem agribisnis perkebunan).

- Petani-pekebun memiliki akses sepenuhnya terhadap layanan dan sumberdaya produktif, seperti lahan, pembiayaan, informasi, teknologi, dan pasar.
- Petani-pekebun Jawa Timur dilindungi dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga memiliki kemampuan dan keberdayaan untuk mengembangkan kegiatan yang dilakukannya. Demikian pula pelaku usaha perkebunan mendapat perlindungan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan.
- Petani-pekebun memiliki tingkat pendidikan, status gizi dan ketahanan pangan, serta kesetaraan gender yang baik.
- Pelaku usaha bidang perkebunan memperoleh kondisi lingkungan usaha, khususnya berbagai peraturan yang terkait dengan kegiatan usaha; yang dapat mendorong peningkatan daya saing, dan produktivitas usaha.
- Pelaku usaha bidang perkebunan memiliki akses terhadap dukungan pembiayaan, informasi, dan teknologi yang aktual dan sesuai dengan perkembangan usaha dan dinamika bisnis yang terjadi.

Potensi sumberdaya perkebunan Jawa Timur demikian besar, sehingga diperlukan pengelolaan sumberdaya yang lestari. Masalah kegureman penguasaan lahan, konversi lahan pertanian terus-menerus, eksploitasi yang berlebihan, serta kerusakan sumberdaya alam, harus dapat dihindarkan dan membalikkan proses pengrusakan yang terjadi menjadi pengelolaan yang lebih produktif sekaligus lebih lestari.

Masa depan produk dan agribisnis perkebunan Jawa Timur harus dapat mengembalikan serta mengembangkan produk-produk perkebunan unggulan dan strategis yang (pernah) memiliki kinerja yang baik dan berdaya saing tinggi, baik di pasar domestik maupun di pasar internasional. Namun beberapa kondisi produk dan bisnis perkebunan Jawa Timur masih menghadapi berbagai permasalahan dalam hal daya saing, efisiensi, profitabilitas, nilai tambah, dan praktek-praktek usaha yang belum memperhatikan aspek lingkungan. Dalam produksi dan distribusi juga masih terdapat banyak kelemahan dalam integrasi komponen-komponen sistem agribisnisnya,

termasuk posisi asimetrik antar sub-sistem baik dalam posisi tawar, informasi, maupun kemampuan mengakses berbagai faktor produktif. Dengan menetapkan harapan tersebut, masa depan produk dan bisnis perkebunan Jawa Timur diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan di atas dan memiliki kemampuan untuk menyandarkan keunggulan produksi dan distribusinya pada kekuatan dan kehandalan kegiatan luar usahatani, khususnya agroindustri dan agroservices dalam satu sistem yang integratif.

Kegiatan pengolahan akhir dan eceran diarahkan untuk lebih mendekati dan melayani konsumen, dan konsumen (termasuk petani) juga memiliki akses untuk menguasai sekaligus mendapatkan manfaat dari kegiatan eceran tersebut. Kegiatan usaha perkebunan mengembangkan jenis-jenis produk dengan mengedepankan optimal-value dari produk yang bersangkutan, membangun merek (*brand*) yang menghasilkan citra (*image*) positif, termasuk merek bersama (*collective brand*) dan merek wilayah (*regional brand*), yang mendukung pengembangan merek Indonesia (*Indonesian brand*).

Skala usaha perkebunan menuju kepada skala keekonomian yang mampu memberikan kinerja yang bersaing, bermutu, dan produktif. Bagi petani-pekebun yang berskala kecil, skala keekonomian dan pengembangan kinerja diperoleh melalui konsolidasi dan pengelolaan serta kelembagaan yang sesuai seperti koperasi pertanian. Kegiatan agribisnis perkebunan terhindar dari berbagai peraturan dan kewajiban yang tidak perlu dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Pelaku agribisnis perkebunan harus membangun integrasi vertikal yang lebih kuat, termasuk membangun asosiasi usaha yang mewadahi pelaku-pelaku usaha dalam satu sistem rantai nilai bisnis. Keunggulan kegiatan agribisnis bidang perkebunan Jawa Timur juga harus didukung oleh kemitraan (*partnership*) antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi/akademi, dan lembaga/kelompok swadaya masyarakat.

4.1. Strategi

Dengan pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan perkebunan di Jawa Timur yang perlu dikembangkan adalah:

1. Penyediaan lahan perkebunan abadi yang dipertahankan sesuai dengan potensi kearifan lokal, serta meminumkan luas lahan tidur dan terlantar dengan memperhatikan kaidah – kaidah lingkungan hidup ;
2. Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk perkebunan ;
3. Pewilayahan komoditi sesuai dengan potensinya, pengembangan wilayah Madura, Pantura, wilayah tengah dan wilayah selatan ;
4. Mengembangkan kelembagaan kelompok tani ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi melalui upaya penguatan modal, kewira – usahaan, membuka akses pasar, kemitraan, serta pemberdayaan asosiasi petani ;

Berdasarkan strategi tersebut di atas, maka pembangunan perkebunan di Jawa Timur pada dasarnya memprioritaskan usaha perkebunan di bagian hulu yang dilakukan oleh petani, kelompok tani atau koperasi perkebunan, sedangkan perusahaan besar berkonsentrasi pada usaha untuk menghasilkan produk antara atau produk akhir perkebunan.

4.2. Kebijakan

Kebijakan umum pembangunan perkebunan adalah memberdayakan di hulu dan memperkuat di hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan, melalui pemberian insentif, penciptaan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan partisipasi masyarakat perkebunan serta penerapan organisasi modern yang berlandaskan kepada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penerapan kebijakan umum tersebut selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan teknis yang meliputi kebijakan pengembangan komoditas, kebijakan pengembangan sumberdaya manusia, kebijaksanaan investasi usaha perkebunan, kebijakan peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem

ketahanan pangan, kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, kebijakan pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha serta kebijakan pengembangan sistem informasi manajemen perkebunan.

a. Kebijakan Pengembangan Komoditas

Kebijakan pengembangan komoditas perkebunan ditempuh melalui optimasi aset perkebunan yang sudah ada dan pengembangan baru, baik untuk komoditas konvensional maupun komoditas potensial lainnya.

Upaya yang ditempuh dalam operasional kebijakan pengembangan komoditas perkebunan sebagai berikut :

- Menerapkan paket teknologi budidaya tanaman perkebunan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi dan diversifikasi;
- Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan regional Jawa Timur sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik;
- Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan yang sesuai untuk tanaman pangan, dengan pengembangan cabang usaha tani lain yang sesuai;
- Memfasilitasi pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi di daerah;
- Mendorong pengembangan aneka produk (products development) perkebunan dan upaya peningkatan mutu untuk memperoleh nilai tambah;
- Memfasilitasi pengembangan dan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan;
- Meningkatkan upaya pengembangan sistem informasi yang mencakup aspek teknologi, peluang pasar, manajemen dan permodalan.

b. Kebijakan Pengembangan Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia perkebunan tidak hanya sebagai faktor produksi, namun lebih penting adalah sebagai pelaku usaha. Kebijaksanaan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan diarahkan agar tumbuh dan

berkembangnya proses perubahan guna mewujudkan sistem dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpu pada kemampuan dan kemandirian pelaku usaha perkebunan. Ruang lingkup sumberdaya manusia perkebunan meliputi jajaran birokrasi sub sektor perkebunan dan SDM petani dan masyarakat perkebunan.

Sedangkan kebijakan pengembangannya adalah sebagai berikut:

❑ Jajaran Birokrasi Sub Sektor Perkebunan.

- Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja aparat;
- Memfasilitasi terciptanya lingkungan kerja yang kondusif dan pengawasan yang efektif;
- Penerapan sistem karir yang terprogram dan transparan;
- Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.

❑ SDM Petani dan Masyarakat Perkebunan

- Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usaha secara berkelanjutan;
- Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat dan mempertanggung usaha taninya;
- Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.

c. Kebijakan Investasi Usaha Perkebunan

Kebijakan investasi usaha perkebunan dimaksudkan untuk lebih mendorong iklim investasi yang kondusif dalam pengembangan agribisnis perkebunan pada sentra-sentra perkebunan dengan mengutamakan peran serta petani, UKM dan masyarakat secara luas. Dengan demikian maka potensi sumberdaya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal.

Penerapan kebijakan investasi usaha perkebunan adalah sebagai berikut:

- Fasilitasi, advokasi dan bimbingan memperoleh kemudahan akses pelaksanaan investasi usaha perkebunan;
- Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan memperoleh dan menyebarkan informasi mengenai peluang usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat petani dan masyarakat;
- Mengembangkan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha;
- Mendorong penggalan sumber dana dari komoditas untuk pengembangan komoditas.

d. Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan kemitraan Usaha.

Pengembangan kebijakan kelembagaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian kelembagaan agribisnis perkebunan dalam memanfaatkan peluang. Sedangkan kebijakan pengembangan kemitraan usaha dimaksudkan untuk dapat memperoleh manfaat maksimal dari kegiatan agribisnis perkebunan.

Kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- Memfasilitasi peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait;
- Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditas perkebunan yang tumbuh dari bawah;
- Mendorong dan memfasilitasi penumbuhan kelembagaan keuangan pedesaan;
- Mendorong kelembagaan penyuluhan untuk lebih berfungsi;
- Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

e. Kebijakan Pengembangan Dukungan terhadap Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Kebijakan pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah memanfaatkan sumberdaya

perkebunan secara optimal sesuai dengan daya dukung sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga. Dalam pembangunan perkebunan kebijaksanaan ini dimaksudkan agar pengembangan perkebunan dapat dilaksanakan secara harmonis, ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan ekologi.

Kebijakan yang ditempuh adalah:

- Penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan sesuai dengan kaidah konservasi tanah dan air;
- Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan (GAP dan MP);
- Meningkatkan dukungan rehabilitasi lahan kritis, DAS hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga kawasan lindung;
- Meningkatkan penerapan teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan;
- Meningkatkan sosialisasi peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon dan penyedia oksigen.

f. Kebijakan Peningkatan Dukungan terhadap Pembangunan Sistem Ketahanan Pangan

Pengembangan sistem ketahanan pangan di wilayah perkebunan dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan sebagai sistem ketahanan pangan nasional.

Kebijakan peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pengembangan usahatani tumpangsari pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan;
- Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usahatani ternak yang sesuai;
- Memfasilitasi ketersediaan benih tanaman pangan varietas unggul secara melembaga pada wilayah-wilayah sentra produksi perkebunan.

E. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Rencana Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan pembangunan perkebunan Tahun 2009-2014 disusun dengan mengacu kepada Program Pembangunan Pertanian dan Program serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Adapun berbagai program dan ruang lingkup kegiatan yang direncanakan meliputi :

A. Program Prioritas

1.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama petani pekebun melalui berbagai bentuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan kelembagaan untuk meningkatkan posisi tawar dan akses sumberdaya produktif.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Peningkatan Kesejahteraan petani meliputi:

1. Pemberdayaan dan pengentasan masyarakat miskin khususnya petani, laki-laki maupun perempuan.
2. Perlindungan petani dari persaingan usaha yang tidak sehat dan perdagangan yang tidak adil.
3. Penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani dan nelayan.
4. Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan, melalui pengembangan lembaga keuangan pedesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha perkebunan/pertanian.
5. Perbaikan sistem dan mekanisme distribusi pupuk subsidi

1.2. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program ini dimaksudkan untuk mendukung ketersediaan, pengawasan mutu dan keamanan pangan sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan melalui integrasi cabang usahatani pangan dan ternak di areal perkebunan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Peningkatan Ketahanan Pangan meliputi:

1. Pemantapan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga, daerah dan wilayah.
2. Peningkatan pengelolaan pasca panen dan pengolahan hasil.
3. Pengamanan ketersediaan pangan melalui pencegahan konversi lahan sawah di daerah irigasi dan peningkatan mutu intensifikasi pertanian.

1.3. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkeadilan melalui berbagai kegiatan usaha perkebunan, mulai dari kegiatan *on farm* sampai dengan *off farm* secara efisien dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan meliputi:

1. Peningkatan mutu dan nilai tambah produk pertanian/perkebunan di tingkat petani ;
2. Pengembangan diversifikasi usahatani, melalui pengembangan usahatani dengan komoditas unggulan bernilai ekonomi tinggi.
3. Pengembangan sistim informasi pasar dan pembentukan *clearing houses* di bidang agribisnis.
4. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian/perkebunan dan pedesaan.
5. Penguatan keterkaitan industri pedesaan (hulu-hilir, *on farm-off farm*), berbasis sumberdaya lokal, baik sumberdaya alam maupun manusia.
6. Fasilitasi pengembangan agribisnis melalui kemitraan masyarakat petani dan pemilik modal.

7. Fasilitasi perdagangan antar wilayah dan perlindungan petani dari sistem perdagangan tidak adil.

1.4. Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan secara terintegrasi, terencana dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Pengembangan Kawasan Agropolitan meliputi :

1. Pemantapan dan pengembangan kawasan agropolitan yang strategis dan potensial, melalui pembentukan klaster komoditas unggulan yang berpotensi ekspor.
2. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana infrastruktur pendukung Kawasan Agropolitan termasuk Perbankan dan lembaga keuangan serta pengembangan teknologi informatika dan telekomunikasi.
3. Peningkatan daya tarik investasi ke kawasan agropolitan dengan pemberian intensif dan kemudahan perijinan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di pedesaan pendukung pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan potensi pertanian yang ada di masing-masing daerah.
5. Perluasan jaringan pasar dan pusat – pusat bisnis, serta peningkatan promosi produk – produk agropolitan.
6. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan agropolitan.

1.5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini merupakan usaha peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas dengan penyediaan bahan tanaman yang unggul sehingga sesuai standar industri dan kualitas ekspor.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan meliputi :

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan mutu hasil perkebunan.
2. Peningkatan kualitas bibit/benih, kapasitas produksi dan pengembangan komoditas perkebunan bernilai ekonomi tinggi dan berdayasaing tinggi.
3. Peningkatan produksi gula melalui penyediaan bibit tebu unggul, bongkar ratoon, dan penanganan pasca panen.
4. Peningkatan kualitas tembakau sesuai standar industri dan kualitas ekspor, melalui peningkatan kualitas bibit, perbaikan sistim budidaya dan pengelolaan pasca panen ;
5. Pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit ;

B. Program Penunjang

1.6. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan petani perkebunan melalui penerapan teknologi pertanian/perkebunan dengan peningkatan ilmu pengetahuan, pengembangan riset, pemanfaatan teknologi, pendidikan dan pelatihan perkebunan secara terencana dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan meliputi :

1. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perkebunan, pengembangan riset pertanian dan pengembangan serta pemanfaatan teknologi tepat guna, dan spesifik lokasi yang ramah lingkungan.
2. Peningkatan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pertanian yaitu petani, nelayan, penyuluh dan aparat pembina dan penguatan lembaga pendukungnya, untuk meningkatkan posisi tawar petani.
3. Fasilitasi pengembangan dan pembangunan pabrik gula mini.

1.7. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, stabilisasi harga produksi dan pengembangan jejaring perdagangan dan agribisnis untuk

mendorong pengembangan pasar produk perkebunan secara terencana dan berkelanjutan.

Adapun kegiatan-kegiatan pokok dari Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan meliputi :

1. Stabilisasi harga produksi dan pengembangan produk turunannya serta penciptaan pasar untuk mendorong perluasan lapangan kerja.
2. Pengembangan jejaring perdagangan dan agribisnis untuk mendorong pengembangan pasar yang efisien dan berkeadilan bagi produk – produk perkebunan.
3. Promosi dan pengembangan pemasaran produk pertanian, perkebunan dan peternakan.
4. Fasilitasi perdagangan antar wilayah dan perlindungan petani dari system perdagangan tidak adil.

1.8. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan.

Program ini dimaksudkan untuk mendukung revitalisasi sistem penyuluhan sehingga pembinaan petani perkebunan beserta kelembagaan dapat tumbuh secara dinamis dan mandiri.

Adapun kegiatan pokok dari Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian, Perkebunan adalah :

1. Revitalisasi sistem penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan Dinas Perkebunan. Indikator kinerja yang menjadi perhatian Dinas Perkebunan adalah:

2.1. Indikator Luas Areal Tanaman Perkebunan

Diproyeksikan bahwa luas areal tanaman perkebunan khususnya 7 komoditi unggulan dan didukung komoditi perkebunan lainnya di tahun 2014 mencapai 1.061.477 hektar, dengan mengalami pertumbuhan selama 5 tahun sebesar 77.362 hektar. (lihat **Tabel 10**).

Pengembangan areal perkebunan di Jawa Timur tahun 2009-2014 di arahkan pada pembentukan kawasan meliputi zona Madura, zona pantai utara, zona tengah dan zona pantai selatan. Lebih spesifikasi masing-masing zona merupakan kawasan untuk jenis komoditi perkebunan sesuai **Tabel 11**.

Tabel 10 Proyeksi Perkembangan Areal Tanaman Perkebunan di Jawa Timur Tahun 2009-2014, dalam hektar

Komoditi/ Pertumbuhan	Luas areal (Ha)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tebu	186.026	193.396	197.000	208.000	210.000	215.000
Kakao	54.007	54.657	61.500	67.150	71.500	77.000
Cengkeh	41.474	42.007	43.900	40.000	46.500	47.000
Tembakau	112.007	109.250	130.000	115.000	115.000	115.000
Kelapa	293.644	293.750	298.414	298.438	299.292	301.577
Kopi	95.216	95.266	98.753	99.191	100.338	100.500
Jambu Mete	48.284	48.284	51.184	52.700	53.800	85.100
Lain-lain	145.232	147.505	148.200	149.300	149.900	150.800
Total	975.890	984.115	1.026.951	1.035.779	1.046.030	1.061.477

Tabel 11 Pembagian zona wilayah per kabupaten dan komoditas

NO	ZONA WILAYAH	KABUPATEN	KOMODITAS
1.	Zona Madura	Sumenep Sampang Bangkalan Pamekasan	Kelapa, Cabe Jamu, Jambu Mete, Tembakau Jambu Mete, Tebu Kelapa, Tebu, Jambu Mete Tembakau, Kelapa, Jambu Mete
2.	Zona Tengah	Ngawi Magetan Madiun Nganjuk Jombang Kediri Ponorogo Jember Mojokerto Sidoarjo Pasuruan Gresik Bondowoso	Kelapa, Tebu, Kakao, Jambu Mete Tebu, Kopi Kakao, Tebu, Kelapa Kelapa, Cengkeh, Kakao, nilam Tembakau, Tebu, Kakao, Cengkeh Tebu, Kelapa, Kopi Kelapa, Kakao, Jambu Mete, Cengkeh, Kapas Tebu, Tembakau, Kelapa, Kopi Tebu, Kapas Tebu, Kelapa Kopi, Kapas Tebu, Kelapa Tebu, Tembakau, Kopi
3	Zona Pantai Utara	Lamongan Bojonegoro Tuban Situbondo Probolinggo	Tembakau, Tebu, Kapas Tembakau, Kelapa, Tebu Kelapa, Jambu Mete, Tebu Tebu, Tembakau, Kelapa, Kopi Tembakau, Kopi, Tebu
4	Zona Pantai Selatan	Pacitan Trenggalek Tulungagung Blitar Malang Banyuwangi Lumajang	Kopi, Kelapa, Kakao Kelapa, Kakao, Cengkeh, Nilam Kelapa, Tebu Tebu, Kelapa, kakao, Kopi, Nila, Tebu, Kelapa, Kopi, Nilam Kopi, Kelapa, Kakao Kelapa, Tebu, Kopi

2.2. Indikator Total Produksi Perkebunan

Total produksi perkebunan adalah hasil tanaman perkebunan seperti tebu, kakao, cengkeh, tembakau, kelapa, kopi, jambu mete, dll, dalam kurun waktu tertentu. Diproyeksikan bahwa produksi total perkebunan pada tahun 2014 sebesar 1.776.648 ton atau menunjukkan pertumbuhan produksi perkebunan sepanjang tahun 2009-2014, adalah sebesar 249.926 ton (lihat

Tabel 12).

Tabel 12. Proyeksi Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan di Jawa Timur Tahun 2009-2014, dalam ton

Komoditi/ Pertumbuhan	Produksi (Ton)					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tebu	1.079.287	1.013.229	1.245.000	1.410.000	1.572.394	1.637.000
Kakao	22.677	24.200	27.058	29.486	31.960	34.683
Cengkeh	10.808	10.340	11.516	11.631	11.747	11.865
Tembakau	80.661	53.695	87.285	93.035	94.875	100.080
Kelapa	250.391	257.891	260.250	262.400	264.700	267.100
Kopi	54.019	56.200	54.815	55.343	55.677	56.200
Jambu Mete	14.907	10.500	10.710	10.925	11.115	11.400
Lain-lain	90.955	100.865	115.800	117.200	119.050	120.600
Total	1.603.705	1.526.920	1.605.091	1.699.530	1.715.649	1.776.848

2.3. Indikator Produktivitas komoditas perkebunan

Capaian Produktivitas komoditas perkebunan merupakan *outcome* yang dihasilkan oleh sektor perkebunan. Diproyeksikan bahwa sepanjang periode tahun 2009-2014 mengalami peningkatan, dengan produktivitas komoditas perkebunan akan dicapai di tahun 2014 sebesar 1.781 kg/ha/tahun hasil perhitungan target rata-rata pertumbuhan 7 (tujuh) komoditi unggulan (lihat **Tabel 13).**

Capaian produktivitas tinggi diharapkan akan disumbangkan oleh 7 komoditas unggulan tebu, kakao, cengkeh, tembakau, kelapa, kopi, jambu mete.

Tabel 13. Proyeksi Perkembangan Produktivitas Tanaman Perkebunan di Jawa Timur Tahun 2009-2014, dalam kg/ha/tahun

Komoditi/ Pertumbuhan	Produktivitas (kg/ha/tahun) %					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tebu		5,00	4,76	4,55	4,35	4,17
Kakao		1,25	1,23	1,22	1,20	1,19
Cengkeh		4,00	3,85	3,70	3,57	3,45
Tembakau		2,86	2,78	2,70	2,63	2,56
Kelapa		2,08	2,04	2,00	1,96	1,92
Kopi		4,17	4,00	3,85	3,70	3,57
Jambu Mete		1,54	1,52	1,49	1,47	1,45
Total						

F. PENUTUP

Pembangunan perkebunan melalui pengembangan dan penumbuhan sistem dan usaha agribisnis berbasis perkebunan pada hakekatnya dilakukan melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri hilir, pengembangan diversifikasi usaha, pemberdayaan SDM perkebunan, penumbuhan kelembagaan, bertumpu pada peningkatan peran petani, masyarakat, UKM dan Koperasi serta dunia usaha.

Peran pemerintah di dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan lebih bersifat pelayanan, fasilitasi, pendampingan, advokasi dan penciptaan iklim usaha.

Berbagai perkembangan yang telah dicapai masih harus memperoleh perhatian dan membutuhkan kerjasama serta dukungan dari semua pihak baik yang berada di Pusat maupun di Jawa Timur, agar sektor perkebunan ini dapat eksis dan menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur.